

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi di suatu negara dapat dikatakan berhasil jika mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah (Sukirno, 2011). Tingkat kemakmuran suatu negara sangat erat kaitannya dengan kedua hal tersebut. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka semakin tinggi pula tingkat kemakmuran suatu negara. Todaro (2003) mengatakan ada 3 komponen utama yang menjadi faktor pertumbuhan ekonomi, pertama yaitu akumulasi modal mencakup semua model investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal manusia. Kedua adalah pertumbuhan penduduk yang dapat menambah jumlah angkatan kerja. Dan yang ketiga adalah perkembangan teknologi atas penemuan mengenai cara-cara yang lebih terbaru dalam membenahi suatu pekerjaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pertumbuhan penduduk merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh Indonesia khususnya di Kota Padang. Meskipun laju pertumbuhan penduduk saat ini semakin menurun namun pada kenyataannya jumlah penduduk Indonesia selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Terhitung tahun 2010 penduduk di Kota Padang berjumlah sebanyak 833.562 jiwa, tahun 2015 naik menjadi 902.413 jiwa dan pada tahun 2016 jumlah penduduk meningkat kurang lebih sebanyak 12.555 jiwa hingga

totalnya mencapai angka 914.968 jiwa (BPS, 2016). Tingginya jumlah penduduk menyebabkan munculnya masalah ketenagakerjaan seperti pengangguran karena adanya ketimpangan antara jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah angkatan kerja.

Menurut Sukirno (2011) pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut. Secara ekonomi adanya pengangguran merupakan pemborosan dari sumber daya tenaga kerja yang tidak dapat dimanfaatkan dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Kerugian tersebut berupa hilangnya output nasional yang seharusnya dapat dihasilkan dalam sistem ekonomi, artinya ada pendapatan nasional yang hilang karena tidak ada proses produksi karena tidak adanya kesempatan kerja (Harjanto, 2014).

Jika jumlah pengangguran semakin bertambah, maka sudah pasti tingkat kemiskinan di Indonesia juga akan semakin tinggi. Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi masalah pengangguran dan kemiskinan tersebut adalah melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada tahun 2013 UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 96,99% dengan jumlah unit usaha yang terlibat sangatlah besar yakni mencapai angka 99,99% dari seluruh unit usaha yang ada (Kementrian Koperasi dan UKM, 2016). Maka dari itu, UMKM telah menjadi sektor ekonomi terbesar yang berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja dan menekan angka tingkat pengangguran. Hal ini sehubungan dengan nilai strategis lain UMKM menurut Goso (2015) yaitu kemampuannya menjadi sarana

pemerataan kesejahteraan rakyat. Karena jumlah yang besar, biasanya bersifat padat karya sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang besar, meskipun ukuran unitnya kecil tetapi jumlahnya banyak.

Di Kota Padang sendiri UMKM selalu mengalami jumlah peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, seperti yang tertera pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Data UMKM Kota Padang Tahun 2014-2017**

No	Kecamatan	Jumlah UMKM			
		2014	2015	2016	2017
1	Padang Barat	9.229	9.429	9.629	9.929
2	Padang Timur	5.352	5.552	5.752	6.022
3	Padang Selatan	5.813	6.053	6.288	6.618
4	Koto Tangah	6.824	7.060	7.300	7.660
5	Lubuk Begalung	7.002	7.357	7.657	8.077
6	Pauh	3.492	3.672	3.853	4.122
7	Lubuk Kilangan	6.334	6.474	6.614	6.824
8	Kuranji	12.169	12.349	12.529	12.799
9	Padang Utara	5.395	5.535	5.675	5.885
10	Nanggalo	7.351	7.471	7.591	7.725
11	Bungus Teluk Kabung	5.101	5.221	5.341	5.521
<b>Total</b>		<b>74.062</b>	<b>76.173</b>	<b>78.229</b>	<b>81.182</b>

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang Tahun 2017 (diolah)

Dari tabel 1.1 terlihat bahwa jumlah UMKM di Kota Padang per kecamatan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga pada tahun 2017 jumlah UMKM di Kota Padang berjumlah sebanyak 81.182 unit usaha. Dari 11 kecamatan, jumlah UMKM terbesar di Kota Padang berada di Kecamatan Kuranji dengan jumlah mencapai lebih dari 12.000 unit usaha dan UMKM paling sedikit terdapat di Kecamatan Pauh dengan jumlah hanya 4.122 pada tahun 2017.

Kemunculan UMKM yang membuktikan eksistensinya di perekonomian Indonesia berawal pada saat krisis moneter. Dampak dari krisis terhadap kemiskinan dan tingkat kesejahteraan masyarakat sangat terasa hampir di seluruh negara. Kenaikan kemiskinan bergantung pada GDP riil. World Bank memprediksi penurunan GDP sebesar 12% dapat mengakibatkan peningkatan kemiskinan hingga sebesar 40%. Namun kemiskinan ini akan sangat bervariasi pada tiap-tiap daerah karena bergantung pada sektor apa yang berpengaruh pada daerah tersebut (Marfuah, 2000).

Ketika badai krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998, hanya usaha berskala kecil dan menengah yang relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar. Hal tersebut dikarenakan mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing. Sehingga ketika ada fluktuasi nilai tukar, perusahaan berskala besar yang secara umum selalu berurusan dengan mata uang asing adalah yang paling berpotensi mengalami imbas krisis (Bank Indonesia, 2015).

Sejak saat itu pemerintah mulai menyadari betapa besar dan pentingnya peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia. Selain itu, UMKM juga memberikan kontribusi kepada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB)/Gross Domestic Product (GDP) dan pertumbuhan ekonomi. Kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional menurut harga berlaku pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 3.411,6 triliun atau 56,22%, pada tahun 2011 sebesar Rp4.321,8 triliun atau 58,05%, tahun 2012 sebesar Rp4.869,5 triliun atau 59,08%, dan pada tahun 2013 sebesar



5.440,1 triliun atau 60,34%. Hal ini membuktikan bahwa UMKM memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDB dibandingkan dengan Usaha Besar.

Namun, walaupun mempunyai peranan yang penting UMKM juga memiliki beberapa keterbatasan dan kendala. Pertama, rendahnya kemampuan akses pada sumber-sumber informasi. Kedua, rendahnya kemampuan untuk meningkatkan akses dan peluang pasar. Ketiga, rendahnya kemampuan dan akses terhadap sumber-sumber permodalan termasuk perbankan. Keempat, rendahnya kemampuan dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi. Kelima, rendahnya kemampuan dalam mengembangkan organisasi dan manajemen. Dan yang keenam, lemahnya pembentukan jaringan usaha atau kemitraan antara sesama usaha kecil dan besar (Hejazziy, 2009).

Dilihat dari kendala dan permasalahan tersebut maka pemberdayaan adalah langkah yang tepat untuk mengatasinya. Selain itu, melalui pemberdayaan UMKM juga dapat memajukan kesejahteraan dan menanggulangi kemiskinan (Niode, 2009). Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari 3 sisi. Pertama adalah enabing, yaitu menciptakan kondisi yang memungkinkan agar potensi masyarakat dapat berkembang. Kedua, powering yaitu dengan memperkuat sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dan yang ketiga adalah protecting, yaitu proses pemberdayaan harus melindungi dan mencegah agar yang lemah tidak bertambah lemah karena disebabkan kurang berdaya menghadapi yang kuat.

Pada pelaksanaannya, kebijakan pemberdayaan untuk mengembangkan UMKM tidak bisa hanya terfokus pada bidang permodalan saja tetapi juga harus berorientasi pada seluruh aspek-aspek yang berhubungan langsung dengan peningkatan kinerja UMKM termasuk potensi sumber daya manusianya.

Tujuan dilakukannya pemberdayaan adalah agar UMKM yang lemah bisa menjadi kuat atau paling tidak mengurangi kelemahan yang ada di dalam UMKM tersebut sehingga dapat mengeluarkan potensi yang sesungguhnya serta dapat memanfaatkan peluang yang ada. UMKM yang berdaya adalah UMKM yang mempunyai kapasitas permodalan yang cukup, memiliki akses yang luas terhadap investor, sumber bahan baku dan calon konsumen serta memiliki daya saing yang kuat (Sinaga, 2015). Sehingga nantinya jika telah dilakukan pemberdayaan, diharapkan adanya peningkatan kualitas sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing UMKM sehingga dapat menambah pendapatan melalui kinerja usaha yang semakin baik dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para pelaku UMKM tersebut. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk memberi penelitian ini dengan judul **“Analisis Pengaruh Pemberdayaan dan Kinerja UMKM Terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM di Kota Padang.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka di dapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kota Padang?
2. Bagaimana pemberdayaan berpengaruh terhadap kesejahteraan pelaku UMKM di Kota Padang?
3. Bagaimana kinerja UMKM berpengaruh terhadap kesejahteraan pelaku UMKM di Kota Padang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh pemberdayaan terhadap kinerja UMKM di Kota Padang.
2. Menganalisis pengaruh pemberdayaan terhadap kesejahteraan pelaku UMKM di Kota Padang.
3. Menganalisis pengaruh kinerja UMKM terhadap kesejahteraan pelaku UMKM di Kota Padang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu, terutama pada bidang ekonomi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan

bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti pokok permasalahan yang sama.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada pemerintah khususnya unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Padang.

### 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana pengaruh pemberdayaan terhadap kinerja UMKM dan kesejahteraan pelaku UMKM, dan pengaruh kinerja UMKM terhadap kesejahteraan pelaku UMKM. Ruang lingkup dari penelitian ini adalah para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Padang yang pernah mendapatkan bantuan permodalan baik dari perbankan, koperasi maupun kredit. Penelitian ini diperoleh melalui survey langsung ke lapangan dan informasi yang dikumpulkan dari responden menggunakan kuesioner.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari skripsi ini akan dipaparkan dengan rincian sebagai berikut:

## BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan di jelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.



## **BAB II: TINJAUAN LITERATUR**

Pada bab ini akan di kemukakan landasan teori, hasil temuan peneliti terdahulu dan hipotesis dalam penelitian ini.

## **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Bagian ini akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang berisi tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

## **BAB IV: HASIL EMPIRIS DAN ANALISIS**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil dari penelitian dan analisis dari proses pengolahan data

## **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan penutup dan akan di uraikan beberapa hal yaitu mengenai kesimpulan yang di ambil dari hasil penelitian yang ditemukan pada pembahasan serta pemberian saran bagi pihak terkait.

